

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA TRANSFER DALAM PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI MELALUI SEKTOR UMKM (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Malang)

Risvri Setyani¹, Affifuddin², Taufiq Rahman Ilyas³

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: risvisetyani538@gmail.com*

ABSTRAK

Wabah penyakit baru, yaitu virus corona (COVID-19), telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Konsekuensinya tidak hanya dirasakan di sektor kesehatan, tetapi juga merambah ke berbagai industri, khususnya sektor ekonomi. Perekonomian mengalami goncangan yang serius, mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk menangani dan memulihkan kondisi agar stabilitas ekonomi tetap terjaga dan mencegah jatuhnya negara ke dalam krisis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah pusat dan daerah, termasuk Kabupaten Malang, bekerja sama untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi ini. Kabupaten Malang, sebagai wilayah strategis dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM, juga mengalami dampak negatif akibat pelemahan ekonomi akibat pandemi. Oleh karena itu, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan, salah satunya difokuskan pada peningkatan sektor UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sektor UMKM di Kabupaten Malang menerapkan kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam proses implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi George C. Edward III. Teori implementasi ini mencakup empat elemen utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemulihan ekonomi di Kabupaten Malang telah berhasil. Sektor UMKM menjadi dominan dalam pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022, menunjukkan kontribusi positif terhadap pemulihan ekonomi di tingkat daerah dan nasional. Meskipun demikian, masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi, termasuk kendala dalam hal permodalan dan pemasaran selama pengembangan UMKM.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pemulihan Ekonomi, UMKM.

Pendahuluan

Virus corona pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok pada tahun 2019 dan sejak itu menyebar ke 15 negara. Di Indonesia, pandemi virus corona dimulai pada 2 Maret 2020. Pada tanggal 13 Maret, Presiden Jokowi mengeluarkan Perintah Eksekutif No. 12/2020 dan Perintah Eksekutif No. 7/2020 yang menyatakan penyebaran infeksi virus corona sebagai bencana non-alam nasional. Pada tahun 2020, Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Virus Corona (SATGAS) dibentuk. Saat ini, lebih dari 6.729.756 orang telah terinfeksi virus corona di Indonesia, dengan sekitar 160.810 orang meninggal dan sekitar 6.564.669 orang sakit. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan yang disebut PSBB (pembatasan sosial berskala besar).

Semua kegiatan manusia di daerah terdampak COVID-19 diatur oleh kebijakan ini.

Dampaknya, ekonomi menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah, seperti menanggulangi kegiatan ekonomi, membatasi impor dan ekspor, menghadapi kebangkrutan bisnis, dan mengatasi peningkatan risiko pengangguran akibat PHK selama pandemi. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan kemampuan jangka panjang suatu negara untuk menyediakan lebih banyak barang ekonomi bagi penduduknya. Peningkatan ini berkaitan dengan kemajuan teknologi dan perubahan ideologi serta institusional yang diperlukan (Jhingan 2000: -57).

Di Indonesia, diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sementara tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan panduan untuk mendukung pemulihan ekonomi sebagai langkah pencegahan terhadap dampak pandemi

COVID-19. Sebagai respons terhadap pandemi, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Fiskal Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan. Langkah-langkah ini diambil untuk mengatasi potensi ancaman terhadap stabilitas perekonomian dan sistem keuangan nasional. Peraturan ini mencakup kebijakan fiskal negara, termasuk penerimaan negara dari sektor perpajakan, belanja negara, dan belanja daerah.

Dampak lesunya ekonomi ini juga diantisipasi akan berdampak pada sektor UMKM, yang memiliki kontribusi signifikan terhadap ekonomi Indonesia di berbagai sektor. Jumlah unit usaha di Indonesia mencapai 2 juta, dengan 64 unit usaha di antaranya berasal dari UMKM. Sekitar 1 juta unit usaha UMKM (99,9%) berkontribusi pada jumlah tenaga kerja, di mana total tenaga kerja di Indonesia mencapai 120,6 juta, dan tenaga kerja UMKM mencapai 116,9 juta.

Di sisi lain, Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Perekonomian Kabupaten Malang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, terutama terlihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Sektor pertanian, pariwisata, UMKM, dan perdagangan mendominasi perekonomian Kabupaten Malang. Peningkatan lahan pertanian dan jumlah wisatawan berdampak pada produksi UMKM dan sektor perdagangan di wilayah tersebut.

Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Provinsi Malang mencapai 5,43%, diikuti oleh 5,56% pada tahun 2018 dan 5,56% pada tahun 2019. Namun, dampak pandemi virus corona (COVID-19) menyebabkan situasi ekonomi di Provinsi Malang semakin memburuk pada tahun 2020 dengan penurunan sebesar 2,68%. Meskipun demikian, tahun 2021 mencatatkan peningkatan yang positif sebesar 3,12%, hasil dari upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian pasca pandemi.

Sebagai respons terhadap pemulihan ekonomi, kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 dan diamandemen dengan UU No. 23 tahun 2014 memberikan pemerintah daerah kontrol yang lebih besar atas pengelolaan dan penyelenggaraan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat setempat. Otonomi daerah diakui sebagai aspek penting, mengharuskan pemerintah daerah untuk optimal dalam mengelola pembangunan dan kemajuan lokal. Tahap implementasi menjadi krusial, di mana keberhasilan implementasi program menentukan sejauh mana sebuah kebijakan dapat mendukung pemerintah dan mencapai hasil yang diinginkan di tingkat lokal.

Dalam era new normal saat ini, Pemerintah Kabupaten Malang terus berusaha merumuskan langkah-langkah pemulihan ekonomi dengan menciptakan desain yang efektif. Ini menjadi kerangka kerja untuk mendukung Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Inovasi dalam Program Pemulihan Ekonomi Kabupaten Malang mencakup pengelolaan layanan kesehatan lingkungan, pelatihan keterampilan bagi perempuan kepala keluarga, dukungan terhadap digitalisasi di sektor pendidikan, promosi bantuan sosial untuk kesejahteraan keluarga, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kebijakan ini akan diatur dalam Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer Umum untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Daerah pada Tahun Anggaran 2021.

Dana umum adalah alokasi anggaran dari pendapatan dan belanja nasional yang diberikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi. Dana ini terbagi menjadi dana alokasi umum dan dana pendapatan, digunakan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah guna memberikan layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun demikian, implementasi dana umum masih belum optimal, terlihat dari ketidakmerataan situasi pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Malang, khususnya dalam hal kualitas infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan di Provinsi Malang mengalami penurunan kualitas tenaga kerja karena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat pandemi. Minat wirausaha juga menurun karena ketidakstabilan iklim dalam produksi pertanian, terutama pada tanaman pangan. Banyak petani yang terpaksa menghentikan kegiatan panen. Upaya perbaikan melibatkan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, pelatihan administrasi, dan teknis, serta peningkatan layanan dasar dan jaminan sosial untuk masyarakat miskin.

Dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi di Kabupaten Malang, pemerintah fokus pada penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki potensi besar dan diperlukan perkuatan agar dapat memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian Kabupaten Malang. Dukungan pemerintah melibatkan formulasi kebijakan yang memungkinkan UMKM tetap beroperasi dan pulih dari dampak resesi akibat pandemi COVID-19. Langkah-langkah bantuan ini merupakan bagian dari strategi dan program dukungan pemerintah untuk memperkuat UMKM. Produsen UMKM berharap agar pemerintah Kabupaten Malang terus memberikan dukungan di masa depan, memungkinkan produk mereka untuk diperluas di

pasar dan meningkatkan keterikatan masyarakat terhadap produk lokal.

Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya merumuskan kebijakan baru dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Tujuannya adalah menjaga agar perekonomian kota tetap berjalan sesuai protokol kesehatan, serta membantu memantau arus perdagangan. Partisipasi dalam program pemulihan ekonomi di tingkat nasional menjadi potensi bagi individu yang memenuhi syarat. Menghadapi tantangan di atas, peneliti tertarik untuk menjalankan penelitian dengan fokus pada **"Implementasi Kebijakan Transfer Keuangan dalam Pemulihan Ekonomi Setelah Pandemi di Sektor UMKM"**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan implementasi tindakan pemulihan ekonomi oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Malang setelah masa pandemi COVID-19?
2. Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan langkah-langkah pemulihan ekonomi oleh sektor UMKM di Kabupaten Malang pasca pandemi?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menilai situasi ekonomi Kabupaten Malang setelah masa pandemi COVID-19.
2. Mengkaji pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi untuk mempromosikan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Malang.

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis:

Dari perspektif teoritis, penelitian ini memiliki potensi untuk menyumbangkan pemikiran dan masukan berharga bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemulihan ekonomi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak oleh pandemi Covid-19.

b. Manfaat Praktis:

Dalam konteks praktis, pemerintah berharap bahwa temuan dari penelitian ini dapat berperan sebagai fasilitator dan pendamping yang efektif, membantu dalam menilai dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor UMKM. Dengan hasil penelitian ini, para pihak yang terlibat dalam mediasi dapat mendapatkan panduan, dan arbiter dapat melakukan penilaian yang informasional terhadap sengketa yang timbul. Selain itu, arbiter juga dapat mengevaluasi implementasi langkah-langkah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Untuk masyarakat lokal, diharapkan bahwa

berdasarkan temuan penelitian, mereka dapat mengikuti instruksi dan arahan yang diberikan oleh pemerintah. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berarti untuk memperluas pengetahuan di bidang ini dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Tinjauan Pustaka

1. Politik adalah adaptasi dari kata 'policy' dalam bahasa Inggris dan memiliki perbedaan dengan istilah kebijaksanaan dan kebijakan. Secara esensial, politik adalah rangkaian keputusan yang dibuat oleh aktor politik untuk menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapainya. Menurut Anderson, kebijakan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan spesifik yang dikejar dan dilaksanakan oleh individu atau kelompok pemangku kepentingan untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu.
2. Implementasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan penyelesaian tugas dengan menggunakan sarana untuk mencapai hasil yang berdampak pada suatu hal. Menurut Mazmanian dan Sabatier, implementasi adalah penerapan keputusan kebijakan dasar, umumnya dalam bentuk undang-undang, tetapi juga dapat berupa perintah atau keputusan penting dari penguasa yang berwenang, bahkan melibatkan badan peradilan.
3. Robert Nakamura dan Frank Smallwood menggambarkan bahwa masalah terkait implementasi kebijakan melibatkan penilaian masalah dan kemudian menerjemahkannya menjadi keputusan konkret. Salah satu model implementasi kebijakan yang dikenal adalah model George C. Edward III, yang menekankan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
4. Pemulihan ekonomi adalah proses yang terdiri dari bagian-bagian yang dapat diidentifikasi secara berurutan, pilihan-pilihan, dan keputusan-keputusan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dan hasil-hasil yang didorong oleh keadaan normal atau oleh kombinasi tindakan baru. Pemulihan ekonomi merupakan prediksi dan mengarah pada pengurangan kerentanan, kesetaraan, dan bantuan di masa depan. Selain itu, istilah ini merujuk pada proses di mana bisnis dan ekonomi kembali stabil setelah mengalami krisis atau resesi.
5. Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) adalah jenis usaha yang memiliki peran penting, terutama di Indonesia. Menurut definisi Undang-Undang No. 20 tahun 2008, usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, usaha mikro

juga dapat diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikontrol oleh badan usaha lain.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti memiliki kesempatan untuk melakukan penelitian di lingkungan alami, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2005). Pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang untuk memberikan penjelasan dan gambaran menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti. Hal ini menyoroti pentingnya detail dan kedalaman dalam analisis data. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam implementasi kebijakan transfer dana sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19, dengan fokus pada dukungan terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Malang.

Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah mengarah pada penyelidikan yang jelas, memusatkan perhatian peneliti pada inti dari penelitian yang sedang dilakukan, dan memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi dan analisis hasil penelitian dengan lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Malang setelah pandemi COVID-19. Teori implementasi George C. Edward III, yang mencakup indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, akan digunakan sebagai landasan teoretis. Selain itu, aspek pengembangan sektor UMKM, seperti peningkatan akses produksi, pengembangan sumber daya manusia, dan strategi pemasaran produk, juga akan dianalisis. Selanjutnya, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi langkah-langkah pemulihan ekonomi pasca pandemi oleh sektor UMKM di Kabupaten Malang.

Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian dipusatkan pada Gedung Pemerintah Kabupaten Malang dan Dinas Koperasi serta UMKM Kabupaten Malang. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang situasi aktual yang melibatkan subjek penelitian, kami melaksanakan survei langsung di lokasi tersebut. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif

terkait dengan isu-isu yang tengah dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

Sumber Data

Informasi atau data merupakan pencatatan tertulis tentang apa yang diketahui atau dikenal sebagai fakta, yang diwakili menggunakan simbol-simbol dan angka-angka. Untuk memastikan akurasi data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

- a) Data Primer: Data primer dikumpulkan secara langsung dari informan yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Informasi ini diperoleh melalui teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan, termasuk pejabat dari Sekretariat Perekonomian Daerah Pemerintah Provinsi Malang dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi Malang. Contohnya, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi Malang memberikan wawasan terkait ekonomi mikro kecil.
- b) Data Sekunder: Data ini diperoleh melalui dokumen, laporan, peraturan perundang-undangan, dan sumber informasi online yang relevan dengan implementasi kebijakan dana transfer dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi oleh sektor UMKM.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, di antaranya:

- a) Wawancara: Salah satu metode untuk mengumpulkan data penelitian adalah melalui wawancara. Wawancara merupakan suatu kegiatan interaksi antara narasumber atau sumber informasi melalui komunikasi langsung. Dalam konteks penelitian ini, tujuan wawancara adalah untuk merekam pendapat, perasaan, dan emosi karyawan di perusahaan terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.
- b) Observasi: Observasi adalah metode pengumpulan data secara langsung di lapangan. Proses ini melibatkan pengamatan dan pencatatan sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai fenomena dalam situasi nyata atau buatan. Pengamatan dilakukan dengan bantuan panca indera mata dan panca indera lainnya.
- c) Dokumentasi: Metode pengumpulan data dokumentasi melibatkan pengumpulan informasi dari dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang relevan dengan fokus penelitian. Data-data ini diperoleh dari berbagai sumber dan berkaitan dengan pertanyaan penelitian terkait

implementasi kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi oleh sektor UMKM.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang penting dalam pengumpulan data. Alat-alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi meliputi:

- a) Observasi diri peneliti terhadap lingkungan atau lokasi yang relevan.
- b) Panduan wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang terstruktur.
- c) Buku catatan lapangan sebagai alat bantu atau panduan untuk mencatat informasi yang ditemukan selama observasi di lapangan.
- d) Alat perlengkapan seperti kamera dan perekam suara yang digunakan sebagai alat bantu untuk merekam hasil wawancara.

Semua alat ini dirancang untuk memastikan efektivitas dan keandalan dalam mengumpulkan data penelitian.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik analisis data kualitatif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014:12-14) yang mencakup:

- a) Pengumpulan Data (Data Collection): Mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- b) Kompresi Data (Data Compression): Kompresi data merujuk pada proses pemilihan, fokus, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang mendekati dokumen lapangan, transkrip, wawancara, materi empiris, dan catatan lapangan secara keseluruhan.
- c) Penyajian Data (Display Data): Menyajikan data dengan cara yang terorganisir dan tersusun.
- d) Penarikan Kesimpulan (Conclusion): Melibatkan pertimbangan dan penarikan kesimpulan sejak awal pengumpulan data, seperti mencari pola-pola pengertian yang belum ada, menilai keteraturan penjelasan, dan menilai alur sebab-akibat. Seluruhnya, ini membawa pada kesimpulan komprehensif mengenai seluruh data yang dikumpulkan oleh peneliti.

Keabsahan Data

Validasi data bertujuan untuk menguji dan memastikan bahwa penelitian tersebut merupakan penelitian ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data diuji melalui berbagai metode, termasuk uji reliabilitas (validitas internal),

transferabilitas (validitas eksternal), dependabilitas (reliabilitas), dan konfirmabilitas (objektivitas).

Pembahasan

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Fiskal Nasional dan Stabilisasi Sistem Keuangan dalam menghadapi pandemi COVID-19, bersama dengan Peraturan Bupati Maran No. 13 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Dana Transfer Umum untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi, memberikan pedoman yang jelas untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menerapkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang yang terdampak pandemi.

Fokus penelitian ini adalah untuk menilai implementasi dan keberhasilan langkah-langkah pemulihan ekonomi di Kabupaten Malang, terutama oleh sektor UMKM. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan yang dijelaskan dalam peraturan tersebut, dengan fokus pada memastikan keberhasilan dan modus implementasi Edward III. Analisis hasil penelitian akan memberikan gambaran mengenai perkembangan UMKM dalam menghadapi dampak pandemi dan efektivitas langkah-langkah pemulihan ekonomi yang dijalankan.

- a) Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Malang berfungsi sebagai panduan untuk mencapai visi dan misi manajemen daerah serta menyelesaikan masalah-masalah strategis dalam pembangunan dan kegiatan ekonomi. Dalam menyusun program kegiatan pemerintah, perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi global, nasional, dan regional. Saat ini, kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Malang menunjukkan peningkatan positif, memberikan dorongan untuk pembangunan ekonomi, perkembangan bisnis, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pada tahun 2021, PDB pada harga standar mencatat peningkatan sebesar 4.91%, mencapai 107.036,40 miliar, dengan sektor industri tersier dan sekunder seperti manufaktur dan perdagangan memberikan kontribusi signifikan. Pemerintah Kabupaten Malang berupaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan menerapkan berbagai kebijakan, termasuk mengundang investasi dari pihak luar serta mendukung sektor-sektor lain. Sektor UMKM diakui memiliki peran yang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kabupaten.

- b) Komunikasi antara stakeholder memiliki peran penting dalam menjamin efektivitas implementasi kebijakan. Adanya pedoman dan tujuan kebijakan yang jelas perlu dipahami oleh para pelaksana yang terlibat. Penting untuk memberikan informasi yang tepat kepada para pelaksana mengenai arah dan tujuan kebijakan. Dalam konteks implementasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi di Kabupaten Malang pasca pandemi oleh sektor UMKM, komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Malang dan pemangku kepentingan lainnya, dari tingkat tertinggi hingga terendah, berjalan lancar. Khususnya dalam dinas-dinas yang berhubungan langsung dengan masyarakat melalui pelatihan dan penyuluhan. Untuk mendukung sektor UMKM, kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dan Dinas Koperasi dan UMKM diwujudkan melalui pelatihan untuk membantu pelaku usaha dalam mengembangkan ekonomi mereka melalui kegiatan produksi. Upaya kerjasama ini mendapat respon positif dari masyarakat, tercermin dari minat yang tinggi dalam mengikuti program pelatihan dan inisiatif lainnya. Ini mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi, khususnya di sektor UMKM, melalui kerja sama dan komunikasi yang efektif.
- c) Sumber Daya
- Peneliti mengelompokkan sumber daya yang tersedia di sektor UMKM untuk pelaksanaan kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi di Kabupaten Malang menjadi dua kategori, yaitu:
- 1) Sumber Daya Manusia (SDM)
- Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi, mencakup keterampilan, komitmen, profesionalisme, dan kompetensi. Staf di semua tingkatan Pemerintah Kota Malang, termasuk sekretariat dan dinas, terutama Dinas Koperasi dan Dinas UMKM, menjadi elemen kunci dalam pelaksanaan kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi oleh sektor UMKM. Staf yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini menunjukkan kemampuan kolaborasi dan koordinasi yang luar biasa, baik di tingkat kepemimpinan daerah yang tinggi maupun yang lebih rendah.
- 2) Sumber Daya Finansial
- Suksesnya implementasi kebijakan sangat bergantung pada dukungan

sumber daya finansial. Faktor finansial merupakan elemen krusial yang terkait erat dengan keuangan, dan dalam konteks pemulihan ekonomi, faktor ini memegang peran penting. Oleh karena itu, persiapan yang cermat dalam hal keuangan diperlukan ketika kebijakan pemulihan ekonomi diterapkan. Dukungan keuangan untuk pemulihan ekonomi di Kabupaten Malang terkait erat dengan dana yang disediakan oleh pemerintah pusat, terutama melalui dana transfer umum. Pada tahun 2023, dana transfer umum dianggarkan sebesar Rp. 3.050.156.851.871,00, dengan pendapatan transfer pemerintah pusat mencapai Rp. 2.770.105.615.000,00. Realisasi dana transfer umum pada tahun 2022 sudah mencapai sekitar Rp. 2.600.577.353.091,00, atau sekitar 98,09% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, sektor UMKM juga mendapatkan berbagai program bantuan, seperti BPUM, dengan tujuan membantu mereka dalam meningkatkan kegiatan produksi.

- d) Disposisi
- Disposisi atau sikap pelaksana juga memainkan peran krusial yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Karakter dan kecenderungan pelaksana kebijakan menjadi faktor penentu dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Dalam konteks mewujudkan implementasi kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui sektor UMKM di Kabupaten Malang, pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait telah menunjukkan komitmen dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Terutama, mereka berusaha mengatasi tantangan, terutama dari kelompok yang masih menolak atau menentang kebijakan yang telah ada. Dalam situasi di mana sikap atau pandangan pelaksana tidak sejalan dengan pembuat kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan dapat menjadi lebih rumit. Oleh karena itu, dukungan yang diberikan dan kemungkinan besar pelaksana melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan sangat penting untuk kesuksesan implementasi.

e) Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, prosedur merupakan hal yang sangat penting sebagai panduan atau tata cara untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan berlangsung secara efektif dan terorganisir. Pemerintah Kabupaten Malang dan pihak terkait yang terlibat dalam implementasi kebijakan pemulihan ekonomi melalui sektor UMKM telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan yang harus diikuti. SOP ini berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan akan dijalankan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

Dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi di berbagai sektor di Kabupaten Malang, pemerintah dan berbagai pihak terkait bekerja sama dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, baik itu pemerintah pusat, daerah, desa, dan dinas terkait seperti koperasi dan UMKM. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, mereka mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh presiden, daerah, dan bupati. Sebagai contoh, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer Umum Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Daerah Tahun Anggaran 2021. Dana Transfer Umum ini memiliki tujuan untuk mempercepat penyediaan sarana dan prasarana pelayanan umum dan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan peluang kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan dalam penyediaan pelayanan umum antar daerah, termasuk pengembangan tenaga pendukung pendidikan. Dana ini akan digunakan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah.

Dalam pelaksanaan kebijakan pemulihan ekonomi melalui sektor UMKM, perhatian terhadap pengembangan UMKM menjadi faktor krusial. Beberapa kebijakan strategis yang dirancang oleh pemerintah, seperti Program Pemulihan Ekonomi (PEN), pelaksanaan UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, dan program Bangga Bantuan Indonesia (BBI), mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor UMKM. Di tingkat Kabupaten Malang, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan juga sangat bergantung pada perkembangan sektor UMKM yang ada di dalamnya.

Dalam konteks ini, sektor UMKM perlu mengalami perkembangan yang sejalan dengan perubahan zaman. Keberlanjutan dan peningkatan daya saing pelaku usaha UMKM menjadi prioritas, dan pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan hal tersebut. Dengan memberikan perhatian dan komitmen yang kuat, pemerintah dapat memastikan bahwa para pelaku usaha dapat terus meningkatkan daya saing mereka.

Analisis terhadap pengembangan sektor UMKM di Kabupaten Malang menjadi kunci dalam mencapai tujuan pengembangan usaha para pelaku UMKM. Peran pemerintah Kabupaten Malang dalam mendukung pengembangan UMKM sangat penting dan harus dilakukan dengan optimal.

1) Penguatan Akses Produksi

a. Permodalan

Modal memegang peranan sentral dalam proses produksi, karena tanpa modal yang memadai, bisnis akan kesulitan berkembang. Modal sendiri dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, dan pada umumnya, UMKM memiliki keterbatasan dalam jumlah modal yang tersedia. Oleh karena itu, manajemen modal menjadi keterampilan krusial yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM. Di Kabupaten Malang, permodalan tetap menjadi kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini meliputi kurangnya keterampilan pengelola dalam mengelola keuangan, penyusunan laporan keuangan organisasi, dan manajemen keuangan. Selain itu, bantuan pemerintah yang hanya diberikan sekali setahun seringkali tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan modal semua bisnis. Para pelaku usaha juga cenderung enggan mengajukan pinjaman ke pihak luar dengan bunga tinggi, sehingga mereka lebih memilih mengajukan pinjaman ke lembaga pegadaian yang menawarkan bunga yang lebih rendah. Bagi bisnis yang baru berdiri, mereka seringkali mengandalkan pinjaman modal dari keluarga atau kenalan terdekat..

b. Ketersediaan bahan baku

Tersedianya bahan baku, juga dikenal sebagai inventory, merupakan komponen penting dalam proses produksi barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Karena tuntutan pelanggan akan barang yang tinggi dan tidak terbatas, perusahaan harus melakukan jumlah produksi yang cukup besar karena persaingan pasar yang semakin ketat. Namun, dalam suatu usaha, sistem produksi terkadang tidak berjalan dengan baik sehingga perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan produk tertentu. Salah satu

penyebabnya adalah bahan baku yang tidak tersedia untuk kebutuhan produksi. Akibatnya, perusahaan mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dan konsumen beralih ke produk lain. Dalam hal UMKM di Kabupaten Malang, sebagian besar dari mereka hanya menyediakan bahan baku melalui proses produksi, sehingga mereka hanya akan menyediakan bahan baku apabila bisnis tersebut akan melakukan produksi. Akibatnya, sebagian besar dari mereka tidak memiliki stok bahan baku. Hal ini karena keterbatasan modal yang menyebabkan ketersediaan bahan baku yang terbatas. Mereka mungkin menyetok bahan baku tetapi hanya sesuai dengan kebutuhan produksi.

2) Pengembangan Kapasitas SDM

a. Pelatihan SDM

Berbagai kegiatan dilakukan untuk mengembangkan UMKM di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Permodalan dan pemasaran masih menjadi masalah besar di Kabupaten Malang. Pemerintah Kabupaten Malang dan Dinas Koperasi dan UMKM terus mendukung para pelaku usaha untuk mengembangkan produk mereka melalui pelatihan. Biasanya, Dinas Koperasi dan UMKM bekerjasama dengan organisasi lain untuk mengadakan pelatihan sesuai dengan program dan tema pelatihan. Organisasi lain biasanya berasal dari pemberdayaan perempuan, dinas perdagangan, kementerian lain, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, atau dari platform belanja online seperti Lazada dan Shoopee. Perguruan tinggi biasanya juga mengadakan pelatihan. Dinas Koperasi dan UMKM sendiri menyelenggarakan pelatihan SDM, termasuk pelatihan tentang masalah kelembagaan, masalah produksi, dan pelatihan digital marketing. Selain itu, mereka juga mendirikan (PLUT), melayani para pelaku usaha dalam hal produksi dan pemasaran.

b. Penguasaan Teknologi

Teknologi memiliki potensi untuk mengubah bisnis dari model konvensional ke model yang baru dengan melibatkan peluang dan tantangan yang berbeda. Pelaku usaha perlu meningkatkan keterampilan dan

pengetahuan mereka di berbagai bidang agar dapat bersaing secara efektif di pasar yang semakin kompetitif. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan meningkatkan kemampuan operasional dan memanfaatkan teknologi sebagai alat promosi yang efisien. Pelaku usaha UMKM di Kabupaten Malang memahami dan memiliki kemampuan untuk mengadopsi perkembangan teknologi terkini. Namun, kelemahan utama terletak pada kurangnya konsistensi dalam melakukan promosi melalui media sosial, di mana banyak dari mereka belum berhasil menarik perhatian secara optimal. Dalam konteks produksi UMKM, masih ada pemanfaatan metode manual karena UMKM fokus pada pemberdayaan masyarakat, sehingga lebih mengandalkan tenaga manusia dibandingkan mesin dalam proses produksi. Meskipun demikian, beberapa alat bantu, seperti mesin press dan lainnya, tetap digunakan untuk mendukung kegiatan produksi mereka.

c. Pengembangan Produk

Pengembangan produk adalah proses atau pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengubah produk yang sudah ada atau meningkatkan kegunaannya untuk pasar yang sudah ada, dengan asumsi pelanggan menginginkan fitur baru pada produk. Di Kabupaten Malang sendiri, banyak UMKM yang telah mengembangkan produk mereka dengan menggunakan produk turunan. Misalnya, para pengusaha tempe tidak hanya memproduksi tempe tetapi juga telah mengembangkannya menjadi kerupuk tempe. Mereka melakukan pengembangan ini secara bertahap, setelah memiliki bisnis lama mereka mulai menciptakan produk baru, meskipun dalam pengembangan produk mereka masih belum maksimal.

3) Pemasaran Produk

Salah satu pekerjaan terpenting dari sebuah Pemasaran produk menjadi aspek penting bagi perusahaan, dan pebisnis perlu merancang strategi pemasaran yang efektif. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan harus dapat menunjukkan keunggulan produk mereka dibandingkan dengan produk pesaing.

Dalam merumuskan strategi pemasaran, perusahaan perlu memahami kebutuhan dan keinginan konsumen agar dapat menghasilkan produk yang sesuai. Di Kabupaten Malang, pemasaran produk UMKM masih terbilang lemah, dengan mayoritas promosi dilakukan secara tradisional, seperti melalui teman atau door-to-door. Konsumen cenderung lebih tertarik pada produk industri, karena kualitas produk UMKM dinilai kurang konsisten dan seringkali berubah-ubah. Keterbatasan dalam mengembangkan strategi pemasaran online juga membuat produk UMKM kurang terpantau dan tersaingi. Pelaku UMKM seringkali tidak memiliki kehadiran yang konsisten di media sosial, dan keterampilan pemasaran, seperti fotografi produk, juga masih perlu ditingkatkan. Pada pameran atau bazar UMKM yang diselenggarakan oleh pemerintah, kurangnya penggunaan tester juga menjadi kendala, sehingga konsumen kesulitan mengenal produk dengan baik..

Tentu saja, dalam menerapkan kebijakan dana transfer dalam pemulihan ekonomi, terdapat faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat keberhasilan kebijakan tersebut. Salah satu faktor pendukung implementasi kebijakan pemulihan ekonomi di Kabupaten Malang adalah adanya kerjasama yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan dari tingkat atas hingga tingkat bawah. Selain itu, penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah juga positif. Sebagai tambahan, negara perlu memiliki sumber daya manusia dan keuangan yang memadai. Pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, merespons dengan tepat terhadap masukan masyarakat terkait kebijakan yang dirumuskan, dan upaya terus dilakukan untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut. Standar operasional prosedur yang jelas dalam peraturan dan rencana strategis lembaga juga menjadi faktor pendukung kebijakan pemulihan ekonomi. Kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah desa turut mendukung implementasi upaya pemulihan ekonomi.

Namun, kebijakan pemulihan ini juga dihadapkan pada tantangan dan hambatan selama pelaksanaannya. Masalah politik dan sosial terkait dengan energi dan pasokan pangan, seperti kelangkaan gas LPG dan kenaikan harga bahan makanan, menjadi fokus pemerintah dalam penyelesaiannya. Keterbatasan jumlah bantuan pemerintah juga menjadi hambatan, dan dalam analisis sektor UMKM, kurangnya permodalan dan strategi pemasaran masih menjadi faktor penghambat.

Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang telah diuraikan dalam bab mengenai penerapan kebijakan dana transfer untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi di Kabupaten Malang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- a) Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Malang

Di era new normal ini kondisi perekonomian Kabupaten Malang terus menunjukkan arah positif. Menurut data PDRB tahun 2021, industri pengolahan dan perdagangan mendominasi kenaikan, dan kondisi ekonomi Kabupaten Malang diperkirakan akan terus berkembang hingga tahun 2023. Kondisi ini disebabkan oleh upaya pemerintah pusat yang terus meningkatkan ekonomi melalui stimulus fiskal dan moneter, serta peran sektor UMKM yang semakin berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang.

- b) Komunikasi antar stakeholder

Sektor UMKM di Kabupaten Malang berhasil mengimplementasikan program pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan dukungan dari berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga dinas-dinas di tingkat daerah, termasuk desa dan kelurahan. Pemerintah kabupaten aktif menyosialisasikan program pemulihan ekonomi, dan banyak masyarakat merespon positif serta turut serta dalam menjalankan program tersebut.

- c) Sumber daya

Seluruh karyawan dan staf di Kabupaten Malang sudah cukup baik dan mumpuni dalam melaksanakan kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemic melalui sektor UMKM. Kemudian sumber daya finansial juga sudah cukup dengan adanya program bantuan pemerintah salah satunya melalui dana transfer umum.

- d) Disposisi

sikap dari implementor atau pemerintah sudah cukup baik. Dalam upaya mewujudkan kebijakan pemulihan ekonomi masyarakat, pemerintah dan stakeholder lainnya selalu siap dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintah dan stakeholder lain terus bekerja sama untuk mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat agar tujuan kebijakan dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan sasarannya, meskipun ada perbedaan pendapat tentang bagaimana kebijakan tersebut diterapkan.

- e) Struktur Birokrasi

Prosedur atau pedoman yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan pemulihan ekonomi terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Dana Transfer Umum untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Daerah Tahun 2021, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Koperasi dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis 2016-2021 dan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2022.

Jika kita meninjau evolusi sektor UMKM, permodalan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku ekonomi di Malang. Selanjutnya, ketersediaan bahan baku masih dapat dipesan. Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah terus menyelenggarakan pelatihan di berbagai bidang, termasuk pemasaran digital. Di bidang penguasaan teknologi, pelaku ekonomi di Provinsi Malang sudah mengikuti perkembangan terbaru, meskipun ada ketidak-konsistenan. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi oleh pelaku ekonomi di Provinsi Malang adalah dalam hal pemasaran, dengan banyak dari mereka masih mengandalkan sistem pemasaran door-to-door.

Saran

1. Pemerintah harus terus bekerja sama dan bekerja sama dalam upaya mewujudkan pemulihan ekonomi yang terus stabil dan meningkat serta menangani berbagai masalah strategis politik, sosial, dan budaya. Hal ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mengatasi pengangguran.
2. Pemerintah harus terus melakukan pelatihan pegawai untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas.
3. Dalam upaya untuk meningkatkan akses produksi, para pelaku usaha perlu mengembangkan keterampilan mereka sehingga proses produksi dapat ditingkatkan secara efektif.
4. Dalam hal pengembangan sumber daya manusia, pemerintah diharapkan dapat memberikan pelatihan dan sosialisasi terus menerus kepada pelaku usaha, termasuk pelatihan mengenai produksi dan pemasaran, serta pendampingan langsung secara berkala. Dengan demikian, pelaku usaha diharapkan dapat terus menggali dan mengembangkan produk yang mereka buat.
5. Dalam aspek pemasaran, pemerintah perlu memberikan lebih banyak dukungan kepada UMKM dengan menyediakan fasilitas seperti

toko atau pasar swalayan khusus untuk produk UMKM. Selain itu, mengadakan pameran atau pasar rakyat untuk produk UMKM juga dapat menjadi inisiatif yang bermanfaat. Para pelaku UMKM juga disarankan untuk secara rutin mengikuti pelatihan guna meningkatkan keterampilan pemasaran mereka.

Daftar Pustaka

- Anonymous. (2012). Buku Pembelajaran Kebijakan Pemerintah. Universitas Pattimura.
- H, T. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung; D.M.Paskarina. Ed.
- Karta, R. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan UMKM Yang Terdampak Covid-19. <https://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr/article/download/40/25/>.
- Putra, A. E. (2018). Implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota.
- Saldana, M. &. (2014). Qualitative Data Analysis. America: SAGE Publications.
- Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2005). Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang- Undang No 20 Tahun 2008 tentang Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan daerah kabupaten malang nomor 24 tentang RPJMD Kabupaten malang tahun 2021.
- Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Transfer Umum Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Daerah Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Bupati Malang Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Rencana Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Tahun 2022